



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

2025

RANHIR RENJA

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2025**

**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



<https://disbun.inhilkab.go.id>



perencanaandisbunkab.inhil@gmail.com

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 19 Tahun 2025 Tanggal 20 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat menjadi pedoman khususnya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Tembilahan, Juli 2025

Kepala Dinas Perkebunan

Sutarna, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 19671210 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan Ke- I	7
2.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	15
2.3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	20
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	20
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Formulir E.81. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun Anggaran 2025	8
Tabel 3.1.	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah- langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA - PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara hirarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 360 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi asumsi prioritas pembangunan Daerah, Kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan Nasional, secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat pemersatu bangsa.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 adalah penyesuaian terhadap hasil evaluasi dokumen Renja Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu Triwulan ke 1 (satu) tahun 2025.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat (Renja) Dinas Perkebunan merupakan penyempurnaan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rancangan Perubahan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan Renja merupakan acuan bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.
- 2) Rancangan Perubahan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang berlangsung untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari keberhasilan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar pelaksanaan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- 9) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);
- 10) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
- 11) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
- 12) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 19 Tahun 2025 Tanggal 20 Juni 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagai

penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai tugas, pokok, dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah untuk ;

- 1) Sebagai tindak lanjut hasil efisiensi belanja sesuai Surat Edaran Bupati Nomor : 100.3.4.2/179/BKAD Tanggal 31 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2025 dan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 900.1.1.3/318/TAPD Tanggal 18 Februari 2025 tentang Rasionalisasi dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2025.
- 2) Sebagai tindak lanjut Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir
- 3) Sebagai tindak lanjut Perubahan arah kebijakan, tema serta isu pembangunan yang mnejadi prioritas nasional salah satunya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan swasembada pangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman kepada Dokumen RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 167 Tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan Ke- I Tahun Anggaran 2025
- 2.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan
- 2.3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Simpulan
- 4.2. Saran

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan sampai dengan Triwulan Ke- I Tahun Anggaran 2025

Alokasi Anggaran Dinas Perkebunan Tahun 2025 pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja adalah Rp 14.335.077.273,- (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*). Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, Peran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah membantu mewujudkan Tujuan ke 2 RPD Kabupaten Indragiri Hilir yaitu ; Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang berkelanjutan, dengan Sasaran ke 5 yaitu ; Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggul Daerah dan dengan strategi ke 4 yaitu ; Pengembangan Potensi Agroindustri Daerah yang ditunjukkan oleh Meningkatnya Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan melalui :

- 1) Produksi Komoditas Perkebunan;
- 2) Produktivitas Komoditas Perkebunan
- 3) Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perkebunan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan Hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026. Masing-masing sasaran kemudian ditetapkan indikatornya dan kemudian dibandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Triwulan Ke-I Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Formulir E.81. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2026)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(14 = 6 + 8)	(15=14/8 x100%)	(16)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(14 = 6 + 8)	(15=14/8 x100%)	(16)						
Meningkatkannya Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir																		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir																		
		3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	69	9.846.116.000		69	8.586.666.184	19	1.639.048.974	19	1.637.713.974	19	1.637.713.974	11	17	SEKRETARIAT
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah (Dengan Satuan: Persen)	100	41.865.000		100	65.750.093	11	1.841.000	11	1.841.000	11	1.841.000	11	4	Subkoordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	6	20.933.000		3	37.443.542	1	1.841.000	1	1.841.000	1	1.841.000	17	9	Subkoordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4.579.000		4	12.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	135	16.353.000		5	15.636.551	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		3.27.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi perangkat daerah (Dengan Satuan:persen)	100	8.415.755.000		100	6.022.590.973	53	1.224.688.463	-	1.224.688.463	-	1.224.688.463	-	15	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	53	8.414.830.000		53	6.019.970.973	53	1.224.688.463	53	1.224.688.463	53	1.224.688.463	100	15	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan :	1	925.000		1	2.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan

No	Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2026)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(14 = 6 + 8)		(15=14/8 x100%)		(16)		
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan) Cakupan Ketersediaan Administrasi dan sarana prasarana perangkat daerah (Dengan Satuan:Person)	100	58.874.000			100	67.120.000	-	1.335.000	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	
		3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	4	9.812.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan	
		3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	15	49.062.000			12	67.120.000	-	1.335.000	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah ASN yang mengikuti pendidikan atau diklat (Dengan Satuan:orang)	5	13.082.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		3.27.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)	2	8.176.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	4	4.906.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian	
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang disediakan (Dengan Satuan:jenis)	40	194.609.000			35	966.332.318	5	69.915.320	5	69.915.320	5	69.915.320	13	36	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3.270.000			4	22.000.000	-	3.645.000	-	3.645.000	-	3.645.000	-	111	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	25	32.707.000			19	65.921.318	5	15.919.620	5	15.919.620	5	15.919.620	20	49	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	24.530.000			6	110.150.000	-	21.060.000	-	21.060.000	-	21.060.000	-	86	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	10	3.270.000			2	7.600.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	61	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	14	16.353.000			6	6.000.000	-	600.000	-	600.000	-	600.000	-	4	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan	250	114.479.000			12	754.661.000	-	26.690.700	-	26.690.700	-	26.690.700	-	23	Subkoordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan

No	Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2026)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(14 = 6 + 8)		(15=14/8 x100%)		(16)	
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan:Laporan) jumlah barang milik pemerintah yang diadakan (Dengan Satuan:jenis)	14	937.094.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaporan Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	16.353.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	65.416.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	654.171.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	8	8.176.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	13.083.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	163.542.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	16.353.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa penunjang urusan kantor yang disediakan (Dengan Satuan:jenis)	10	114.969.000		10	1.377.872.800	1	330.561.131	1	330.561.131	1	330.561.131	10	115	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	490.000		2	2.499.200	-	750.000	-	750.000	-	750.000	-	115	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	3	36.797.000		12	66.000.000	1	10.219.131	1	10.219.131	1	10.219.131	33	28	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	27	77.682.000		12	1.309.373.600	-	319.592.000	-	319.592.000	-	319.592.000	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan (Dengan Satuan:jenis)	14	67.868.000		14	87.000.000	3	10.708.060	3	10.708.060	3	10.708.060	21	16	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan		20.442.000					6.908.060		6.908.060					Subkoordinator

No	Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2026)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14 = 6 + 8)	(15 = 14/8 x 100%)	(16)			
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	3			3	70.000.000	3			3	6.908.060	100	34	Substansi Keuangan dan Perlengkapan	
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	20	6.541.000		20	17.000.000	-	3.800.000	-	3.800.000	-	3.800.000	-	58	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	40.885.000		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan
		3.27.01.2.13	Penataan Oranisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang disediakan	2	2.000.000		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2.000.000		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umum dan Kepegawaian
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan																		
Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan																		
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Dengan Satuan: Ton/Ha/tahun)	2	2.649.389.000		2	3.583.382.900	-	13.544.000	-	13.544.000	-	13.544.000	-	1	SARANA DAN PRASARANA
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen kawasan pembangunan komoditas perkebunan (dengan satuan : dokumen)	5	179.894.000		5	608.689.500	1	8.304.000	1	8.304.000	1	8.304.000	20	5	Subkoordinator Pemasaran
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Dengan Satuan:Laporan)	4	65.416.000		12	55.284.500	1	7.304.000	1	7.304.000	1	7.304.000	25	11	Subkoordinator Pemasaran
		3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan (Dengan Satuan : Hektar)	-	-		6.000	461.182.500	-	-	-	-	360	-	-	-	-
		3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dengan Satuan:Dokumen)	3	32.707.000		2	14.587.500	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	3	Subkoordinator Seksi Produksi
		3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan (Dengan	5	81.771.000		1	77.635.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Lahan dan Irigasi

No	Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2026)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(14 = 6 + 8)		(15=14/8 x100%)		(16)		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Satuan:Dokumen) Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun (Dengan satuan : Jenis)	55	2.469.495.000			45	2.974.693.400	-	5.240.000	-	5.240.000	-	5.240.000	-	0	Subkoordinator Lahan dan Irigasi
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	55	1.308.343.000			6	774.500.000	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Lahan dan Irigasi	
		3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12	81.771.000			1	128.099.500	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Lahan dan Irigasi	
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10	163.542.000			1	35.953.000	-	5.240.000	-	5.240.000	-	5.240.000	-	3	Subkoordinator Lahan dan Irigasi
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10	915.839.000			15	2.036.140.900	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Pengolahan	
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan evaluasi (Dengan Satuan:Person)	88	49.062.000			82	22.431.889	-	-	-	-	-	-	-	SARANA DAN PRASARANA	
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:persen)	5	49.062.000			5	22.431.889	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Pembiayaan dan Investasi	
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Dengan Satuan:Laporan)	5	49.062.000			12	22.431.889	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Pembiayaan dan Investasi	
Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan																			
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Dengan Satuan:Ton/Ha/tahun)	2	343.437.000			2	151.021.750	2	5.458.000	-	5.458.000	-	5.458.000	-	2	PERBENIHAN, PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	luas bencana pertanian yang ditangani (Dengan Satuan:Ha)	2.000	343.437.000			1.000	151.021.750	80	5.458.000	-	5.458.000	-	5.458.000	-	2	Subkoordinator Perlindungan
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Dengan Satuan:Ha)	1.000	49.062.000			1.000	82.124.250	80	3.158.000	-	3.158.000	-	3.158.000	-	6	Subkoordinator Bimbingan Usaha
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25	81.771.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Bimbingan Usaha	

No	Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2026)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(14 = 6 + 8)		(15=14/8 x100%)		(16)			
			Perkebunan	yang Ditangani (Dengan Satuan:Ha)																
		3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Dengan Satuan:Ha)	200	49.062.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Bimbingan Usaha	
		3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pelembagaan dan Kesehatan Hewan (Dengan Satuan:Laporan)	400	163.542.000			3	68.897.500	-	-	2.300.000	-	2.300.000	-	2.300.000	-	1	Subkoordinator Seksi Produksi
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase cakupan bina kelompok tani (Dengan Satuan:%)	75	392.497.000			68	939.955.350	19	48.167.400	78	48.167.400	78	48.167.400	104	12	PENYULUHAN	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	jumlah penyuluhan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:kali)	60	392.497.000			45	939.955.350	53	48.167.400	53	48.167.400	53	48.167.400	88	12	Subkoordinator Kelembagaan	
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	70	245.314.000			70	365.429.850	53	33.321.400	53	33.321.400	53	33.321.400	76	14	Subkoordinator Ketenagaan	
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	7	32.707.000			4	43.541.750	-	10.574.000	4	10.574.000	4	10.574.000	57	32	Subkoordinator Kelembagaan	
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:Unit)	70	49.062.000			70	37.317.250	-	2.772.000	53	2.772.000	53	2.772.000	76	6	Subkoordinator Materi dan Informasi	
		3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Dengan Satuan:Unit)	3	32.707.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Kelembagaan	
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Dengan Satuan:Unit)	3	32.707.000			2	32.484.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	5	Subkoordinator Kelembagaan	
		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dengan Satuan Dokumen)	-	-			400	461.182.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Kelembagaan	
Meningkatnya Diversifikasi Komoditi Perkebunan																				
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan (Dengan Satuan:persen)	50	433.385.000			43	1.051.619.200	10	171.996.750	12	171.996.750	12	171.996.750	23	40	SARANA DAN PRASARANA	

No	Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2026)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah berjalan (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diawasi dan dikelola (Dengan Satuan:jenis)	15	294.376.000			13	999.995.600	3	170.520.750	3	170.520.750	3	170.520.750	20	58	Subkoordinator Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Dengan Satuan:Laporan)	3	49.062.000			2	30.360.000	-	1.740.000	-	1.740.000	-	1.740.000	-	4	Subkoordinator Perbenihan	
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	15	245.314.000			13	969.635.600	3	168.780.750	3	168.780.750	3	168.780.750	20	69	Subkoordinator Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah varietas tanaman perkebunan yang ditingkatkan mutu genetiknya (Dengan Satuan:varietas)	5	139.009.000			3	51.623.600	-	1.476.000	-	1.476.000	-	1.476.000	-	1	Subkoordinator Perbenihan	
		3.27.02.2.02.0001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Dengan Satuan:VUB)	2	40.885.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subkoordinator Perbenihan	
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dengan Satuan:Dokumen)	2	49.062.000			1	30.360.200	-	476.000	1	476.000	1	476.000	50	1	Subkoordinator Perbenihan	
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dengan Satuan : Dokumen)	2	49.062.000			2	21.263.400	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	2	Subkoordinator Perbenihan	
JUMLAH						13.713.886.000				14.335.077.273	-	1.878.215.124	-	1.876.880.124	-	1.876.880.124	-	13,69		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				Ketersediaan Sumber Daya																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				Persentase keberhasilan kinerja terlihat lebih kecil karena terdapat kekeliruan dalam penyusunan rencana target di awal Renstra Perangkat Daerah																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*)				Menyesuaikan dengan perhitungan keberhasilan kinerja berdasarkan Triwulan sebelumnya																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):				Penyempurnaan rencana target dan satuan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan																

Berdasarkan Tabel 2.1. dapat dilihat Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Triwulan ke I Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 6 Program, 16 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Dimana Realisasi Anggaran secara keseluruhan adalah Rp 1.878.215.124,- dengan persentase yaitu 13,69%.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam ketercapaian kinerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Tersedianya Sumberdaya pada masing-masing Sub Kegiatan dan Program Kegiatan. Namun demikian, dengan melihat persentase capaian kinerja pada Triwulan Ke I ini yang masih berada dibawah 50% menjadi bahan evaluasi dan akan ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan untuk Triwulan berikutnya. Tentunya dalam hal upaya meningkatkan capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik ketersediaan Sumberdaya dan Anggaran.

2.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan pada pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terbagi menjadi 2 yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

1) Faktor Internal

- Ketersediaan SDM Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang masih terbatas
- Pembagian kerja belum mencakup kepada seluruh kegiatan dan sub kegiatan
- Terdapat beberapa perubahan rencana kerja pelaksanaan kegiatan

2) Faktor Eksternal

- Kelengkapan administrasi Kelompok Tani yang belum tersedia sepenuhnya
- Lokasi kegiatan yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan perencanaan waktu pelaksanaan yang matang

- Terdeteksi beberapa wilayah kelompok tani yang termasuk kedalam Kawasan Hutan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan

Faktor Eksternal dan Internal penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan pada pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berdampak pada pencapaian target kinerja, baik dalam pelaksanaan kegiatan dan juga pencapaian realisasi fisik dan keuangan. Kebijakan yang telah dilaksanakan untuk meminimalisir dampak terhadap faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Evaluasi rutin atau setiap bulannya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja
- b. Melakukan penempatan-penempatan SDM yang tersedia sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Mempersiapkan rencana kerja tepat waktu dan tepat sasaran kinerja
- d. Memaksimalkan kinerja Excavator yang tersedia untuk pekerjaan Tanggul mekanik dan mengatur pola kerja operasional Excavator
- e. Pendampingan kelompok tani oleh Tenaga Penyuluh lapangan
- f. Menugaskan Tenaga Fungsional Penyuluh Lapangan berdasarkan domisili atau lokasi terdekat yang mudah dijangkau
- g. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi terkait lahan perkebunan masyarakat yang termasuk kedalam kawasan hutan.

2.3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan

Karakteristik pembangunan perkebunan merupakan program pembangunan berkelanjutan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga optimalisasi pelaksanaan program kegiatan merupakan upaya mempertahankan keberhasilan yang telah diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya.

Rendahnya produktivitas komoditas perkebunan khususnya komoditas tanaman kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari luasnya lahan yang tua dan rusak akibat terendam air laut sebagai akibat

dari rusaknya trio tata air kebun (Tanggul Mekanik, Pintu Klep dan Saluran Irigasi), serta prasarana dan sarana penunjang seperti Jalan Produksi, serangan hama dan masih ada beberapa permasalahan sesuai fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

a. Permasalahan di Bidang Prasarana dan Sarana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang prasarana dan sarana, sebagai berikut :

- Masih rendahnya tingkat kemampuan petani dalam melakukan perbaikan/pemeliharaan sarana, prasarana dan infrastruktur kebun, sementara laju kerusakan kebun justru semakin besar setiap tahunnya.
- Terdegradasinya kemampuan lingkungan dalam menahan laju *infiltrasi* (intrusi) air laut, sehingga luas kebun yang rusak dan kritis semakin bertambah. Di sisi lain, kemampuan untuk melakukan kegiatan penanggulangan kebun yang rusak dan kritis oleh Dinas Perkebunan terbatas dengan ketersediaan dana dan sumber daya yang ada.
- Terbatasnya akses prasarana dan sarana penunjang, seperti Jalan produksi pada lahan perkebunan untuk mendukung akses distribusi hasil perkebunan masih rendah menyebabkan biaya angkut sarana produksi dan hasil panen menjadi tinggi karena mahalnya biaya transportasi air yang pada kondisi tertentu transportasi air juga tergantung waktu pasang surut sehingga transportasi air menjadi tidak efisien.
- Semakin tingginya air pasang setiap tahun dan abrasi laut yang semakin meningkat sudah tidak bisa diatasi dengan tindakan manual trio tata air yang ada yang sebagian besar trio tata air tersebut sudah mulai rusak.

b. Permasalahan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, sebagai berikut:

- Produktivitas Kelapa masih rendah dan ketersediaan sarana produksi perkebunan terbatas.

- Minimnya pengetahuan petani dalam mengembangkan bibit unggul.
- Keterbatasan Tim Peneliti sehingga Masih kurangnya Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT).
- Masih terjadi serangan organisme pengganggu tanaman yang sifatnya *Insidental*, tetapi tingkat serangan termasuk masif (berat) yang merugikan secara ekonomis.
- Masih rendahnya partisipasi pemilik kebun dalam melakukan pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara swadaya. Pemilik kebun lebih mengharapkan bantuan pemerintah.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan masih terbatasnya tenaga Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) jika dibandingkan dengan jumlah dan luas wilayah pengamatan serta masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan aparat dan petani dalam pengendalian hama secara terpadu.
- Belum sepenuhnya program pengembangan tanaman perkebunan bias mencakup keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara, program ini dinilai sangat perlu. Sebagai contoh, program pengembangan tanaman kakao dan kopi sebagai tanaman sela di antara tanaman perkebunan utama.
- Masih rendahnya pengembangan komoditas tanaman perkebunan untuk beberapa komoditas, seperti tanaman kelapa, karet dan sagu. Faktor yang mempengaruhinya lebih disebabkan karena banyaknya kepentingan untuk melakukan alih fungsi ke komoditas lain yang secara ekonomi dinilai lebih menguntungkan.
- Belum maksimalnya pemanfaatan benih/bibit kelapa sawit yang berasal dari sumber yang resmi, dimana di lapangan masih sering ditemukan beredarnya benih/bibit yang tidak jelas asal usulnya (bibit palsu). Sebagai upaya untuk meminimalisir hal tersebut Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memfasilitasinya dengan memberikan bantuan benih berupa

kecambahkelapa sawit dan bibit kelapa sawit siap tanam kepada petani. Selain itu, juga diberikan fasilitasi kepada petani/kelompok tani yang berkeinginan membeli benih/bibit yang resmi.

c. Permasalahan Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pengolahan dan pemasaran, sebagai berikut :

- Belum optimalnya bantuan dan pemanfaatan alat/mesin pengolahan hasil dan penanganan pasca panen perkebunan oleh kelompok tani/kelompok usaha.
- Akses pasar dan pemasaran produk hasil perkebunan petani di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbatas, sementara produk hasil perkebunan berikutan dengan turunannya sangat melimpah.
- Pengetahuan dan pemahaman petani mengenai penerapan standardisasi mutu masih rendah. Akibat dari itu, nilai penerimaan pasar dan daya saing terhadap produk hasil perkebunan petani di Kabupaten Indragiri Hilir juga masih rendah.
- Fluktuasi harga dan penentuan harga ditentukan sepihak dan produk perkebunan yang dihasilkan masih berupa bahan baku dan produk hasil olahan belum optimal.

d. Permasalahan Bidang Penyuluhan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang penyuluhan, sebagai berikut :

- Penyebarluasan informasi teknologi usahatani perkebunan tidak merata karena tenaga penyuluh sangat kurang.
- Pemutakhiran teknologi dari sektor hulu maupun hilir masih lambat. Oleh karenanya, proses transfer teknologi masih perlu terus digalakkan kepada petani.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dan penyempurnaan dari Rencana Strategis yang disusun karena pada tahun anggaran berjalan terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari APBN berupa Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit (DBH Kelapa Sawit) serta Efisiensi Anggaran sebagai bentuk tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari pencapaian strategis pembangunan yang terdapat dalam dokumen RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal Perkebunan.
2. Penguatan daya saing produk perkebunan.

Dalam mencapai sasaran strategis pembangunan pada rencana kerja Dinas Perkebunan, maka aspek program utama rencana kerja tahun 2025 antara lain :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Perizinan Usaha Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian

Adapun rincian rencana kegiatan per program rancangan akhir perubahan rencana kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.1.**

Tabel 3.1.
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						DINAS PERKEBUNAN							17.323.880.473,00	13.335.077.273,00	13.293.281.679,20								12.657.289.000,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							17.323.880.473,00	13.335.077.273,00	13.293.281.679,20								12.657.289.000,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							17.323.880.473,00	13.335.077.273,00	13.293.281.679,20								12.657.289.000,00	
1	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi				68,53 %	68,53 %	9.356.314.473,00	8.586.666.184,00	8.201.999.174,20								8.960.987.000,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan daerah	-			14 Dokumen	14 Dokumen	254.656.400,00	65.750.093,00	65.750.093,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintah an melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	SDM Perkebunan, ASN Dinas Perkebunan		41.865.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	3 Dokumen	164.622.000,00	37.443.542,00	19.917.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Reformasi manajemen pemerintah an melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			20.933.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	35.034.400,00	12.670.000,00	3.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja		4.579.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	55.000.000,00	15.636.551,00	8.786.551,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja		16.353.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 Persen	100 Persen	6.023.970.973,00	6.022.590.973,00	6.022.590.973,00			-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	SDM Perkebunan, ASN Dinas Perkebunan		8.415.755.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	76 Orang/bulan	6.019.970.973,00	6.019.970.973,00	6.149.224.505,20	Kab. Indragiri Hilir, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan		8.414.830.000,00	DINAS PERKEBUNAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
															Kecamatan, Semua Kel/Desa				an melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja					
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	4.000.000,00	2.620.000,00	1.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja				925.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	164.600.000,00	67.120.000,00	67.120.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	SDM Perkebunan, ASN Dinas Perkebunan		58.874.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	0 Dokumen	57.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja				9.812.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	2.03	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					6		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	107.000.000,00	67.120.000,00	43.990.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			49.062.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan atau Diklat	-			4 Orang	0 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	SDM Perkebunan, ASN Dinas Perkebunan		13.082.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					2 Unit	0 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			8.176.000,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintah an melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja		4.906.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang disediakan	-		100 Persen	100 Persen	2.036.163.500,00	966.332.318,00	966.332.318,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintah an melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	SDM Perkebunan, ASN Dinas Perkebunan	194.609.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	24.200.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00		Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Reformasi manajemen pemerintah an melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja		3.270.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	20 Paket	40.000.000,00	65.921.318,00	62.483.318,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			32.707.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	165.579.500,00	110.150.000,00	87.450.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			24.530.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.000.000,00	7.600.000,00	3.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan	Reformasi manajemen pemerintahan melalui			3.270.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															atan, Semua Kel/Desa		negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	percepatan implementasi akuntabilitas kinerja					
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja		16.353.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	12 Laporan	1.781.384.000,00	754.661.000,00	335.775.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memanfaatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja		114.479.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik pemerintah yang disediakan	-			24 Jenis	0 Jenis	76.500.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintah an melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	SDM Perkebunan, ASN Dinas Perkebunan		37.612.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					6 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintah an melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			8.176.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2 Unit	0 Unit	51.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Reformasi manajemen pemerintah an melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			13.083.000,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																		kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
	3	27	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			16.353.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang disediakan	-			100 Persen	32 Jenis	470.473.600,00	1.377.872.800,00	1.377.872.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	SDM Perkebunan, ASN Dinas Perkebunan			114.969.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.499.200,00	2.499.200,00		Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			490.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja		36.797.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	367.973.600,00	1.309.373.600,00	1.309.373.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja		77.682.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	-			24 Jenis	10 Jenis	252.950.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi	SDM Perkebunan, ASN Dinas Perkebunan	67.868.000,00	DINAS PERKEBUNAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			40.885.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	-			2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	SDM Perkebunan, ASN Dinas Perkebunan		16.353.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					2 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja			16.353.000,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		hijau, dan ekonomi biru					
2	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan				100 %	50 %	1.858.662.000,00	1.051.619.200,00	816.789.200,00							392.500.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diawasi dan dikelola	-			17 Jenis	12 Jenis	1.704.982.000,00	999.995.600,00	999.995.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Kelompok Tani, SDM Perkebunan		294.376.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
						Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	2 Laporan	46.460.000,00	30.360.000,00	13.740.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan potensi agroindustri daerah			49.062.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																	
						Jumlah Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	1.658.522.000,00	969.635.600,00	782.945.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Pengembangan potensi agroindustri daerah			245.314.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															sa		g kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah varietas tanaman perkebunan yang ditingkatkan mutu genetiknya	-			-	5 Varietas	153.680.000,00	51.623.600,00	51.623.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Kelompok Tani, SDM Perkebunan		98.124.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	2 Dokumen	60.720.000,00	30.360.200,00	9.140.200,00		Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan potensi agroindustri daerah			49.062.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																
					Jumlah Pemanfaatan SDG				2 Dokumen	2 Dokumen	92.960.000,00	21.263.400,00	10.963.400,00		Kab. Indragiri Hilir,	Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan	Pengembangan potensi			49.062.000,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Hewan/Tanaman									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU)	n keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	agroindustri daerah					
3	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan dan pengembangan prasarana perkebunan				45,44 Persen	45,44 Persen	4.049.602.000,00	3.044.565.400,00	3.360.748.400,00							2.567.868.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen kawasan pembangunan komoditas perkebunan	-			2 Dokumen	10 Dokumen	275.340.000,00	69.872.000,00	69.872.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani, SDM Perkebunan		98.373.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	251.000.000,00	55.284.500,00	27.244.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,	Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan		65.416.000,00	DINAS PERKEBUNAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA A OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian					100 Ha	1400 Ha	0,00	0,00	461.182.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota					2 Dokumen	2 Dokumen	24.340.000,00	14.587.500,00	10.907.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan			32.707.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	77.635.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Pengembangan potensi agroindustri daerah			250.000,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
															sa		g kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	-		4 Jenis	10 Unit	3.774.262.000,00	2.974.693.400,00	2.974.693.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan	Kelompok Tani, SDM Perkebunan		2.469.495.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																	
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	4 Unit	574.500.000,00	774.500.000,00	474.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan			81.771.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																	
						Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan				1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	128.099.500,00	128.099.500,00	Kab. Indragiri Hilir,	Dana Alokasi Umum	Memantapkan sistem pertahanan	Optimalisasi Penanggulangan			163.542.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Dipelihara									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU)	n keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	angan Kemiskinan						
3	27	03	2.02	000g	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					3 Unit	1 Unit	106.340.000,00	35.953.000,00	27.773.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan			915.839.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																			
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi					30 Unit	9 Unit	2.963.422.000,00	2.036.140.900,00	2.153.406.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan			1.308.343.000,00	DINAS PERKEBUNAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		ekonomi biru					
4	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				-	30 %	364.340.000,00	151.021.750,00	28.356.916,00							294.375.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Produktivitas hasil perkebunan	-			2,3 Ton/Ha/Tahun	2,3 Ton/Ha/Tahun	364.340.000,00	151.021.750,00	151.021.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Kelompok Tani, SDM Perkebunan		294.375.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1000 Ha	1000 Ha	166.466.000,00	82.124.250,00	11.624.416,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan potensi agroindustri daerah			49.062.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				60 Ha	0 Ha	63.572.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Pengembangan potensi agroindustri daerah			81.771.000,00	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
												sa		g kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																	
						Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				12 Laporan	3 Laporan	134.302.000,00	68.897.500,00	16.732.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan potensi agroindustri daerah		163.542.000,00	DINAS PERKEBUNAN		
5	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan evaluasi				85 %	85 %	97.002.000,00	22.431.889,00	10.541.889,00					49.062.000,00			
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dan Evaluasi	-			100 Persen	5 Persen	97.002.000,00	22.431.889,00	22.431.889,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Kelompok Tani, SDM Perkebunan	49.062.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian												biru						
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				12 Laporan	12 Laporan	97.002.000,00	22.431.889,00	10.541.889,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan potensi agroindustri daerah			49.062.000,00	DINAS PERKEBUNAN	
6	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase cakupan bina kelompok tani				70 %	70 %	1.597.960.000,00	478.772.850,00	874.846.100,00								392.497.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase cakupan bina kelompok tani	-			100 Persen	70 Persen	1.597.960.000,00	478.772.850,00	478.772.850,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan potensi agroindustri daerah	Kelompok Tani, SDM Perkebunan			392.497.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				70 Unit	8 Unit	1.273.970.000,00	365.429.850,00	335.070.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Pengembangan potensi agroindustri daerah			245.314.000,00	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
															Semua Kel/Desa	Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
	3	27	07	2.01	000g	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian					-	198 Dokumen	0,00	0,00	461.182.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Sawit	-	Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan			0,00	DINAS PERKEBUNAN		
J U M L A H																								12.657.289.000,00	

Pada Tabel 3.1. dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi belanja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dimana pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, total anggaran pada Dinas Perkebunan adalah senilai Rp 17.323.880.473,00 dan setelah mengalami penyesuaian menjadi Rp 13.293.281.679,20. Perubahan anggaran ini merupakan tindak lanjut efisiensi belanja sesuai Surat Edaran Bupati Nomor : 100.3.4.2/179/BKAD Tanggal 31 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2025 dan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 900.1.1.3/318/TAPD Tanggal 18 Februari 2025 tentang Rasionalisasi dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2025 serta penyesuaian terhadap perubahan beberapa kebijakan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 disusun Sebagai tindak lanjut Perubahan arah kebijakan, tema serta isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional salah satunya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dukungan swasembada pangan

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga tetap dilakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2) Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 3) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2024 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

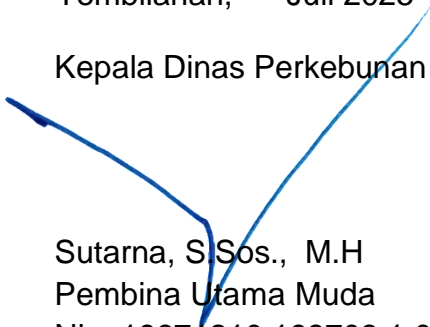
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan capaian kinerja Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir juga berperan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa akan datang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian gambaran Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 yang berdasarkan azas

perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan, pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi untuk melaksanakan kegiatan yang akan datang guna meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Juli 2025

Kepala Dinas Perkebunan



Sutarna, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda
Nip. 19671210 198703 1 001